

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of environmental management policies through UKL-UPL documents in sand and rock mining activities in Klaten Regency, Central Java, following the centralization of authority from the regency level to the provincial government based on Minister of Environment and Forestry Regulation No. 22 of 2025. Using a qualitative approach with explanatory case studies and based on George C. Edward III's policy implementation model, this study examines four key variables: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through in-depth interviews with relevant agencies and analysis of secondary documents. The findings show that the implementation of UKL-UPL in Klaten has experienced systemic failures in all four of Edward III's variables. The centralization of authority has actually weakened environmental governance at the local level because it has not been supported by strengthening coordination capacity, resource allocation, and policy harmonization. There was a breakdown in communication between the province and the regency, limited resources (budget, personnel, facilities), fragmented executive disposition between formalistic attitudes at the provincial level and limited authority at the regency level, and a vertically and horizontally fragmented bureaucratic structure. As a result, UKL-UPL has been reduced to a mere administrative formality and has failed to function as an instrument for preventing environmental damage, as reflected in the continuing degradation of land, disruption of the hydrological system, and the extent of unreclaimed land. This study recommends the need for harmonization of operational authority, strengthening of capacity and resources, and development of an integrated digital-based information system to create more effective and sustainable mining governance at the local level, while restoring the substantive function of UKL-UPL as an instrument for preventing environmental damage.

Keywords: *Policy implementation, UKL-UPL, sand and rock mining, centralization of authority, Edward III model, Klaten Regency.*

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan melalui dokumen UKL-UPL pada kegiatan pertambangan pasir dan batuan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pasca sentralisasi kewenangan dari tingkat kabupaten ke pemerintah provinsi berdasarkan Permen LHK No. 22 Tahun 2025. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatori dan berlandaskan model implementasi kebijakan George C. Edward III, penelitian ini mengkaji empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan instansi terkait serta analisis dokumen sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi UKL-UPL di Klaten mengalami kegagalan sistemik pada keempat variabel Edward III. Sentralisasi kewenangan justru memperlemah tata kelola lingkungan di tingkat tapak karena tidak didukung penguatan kapasitas koordinasi, alokasi sumber daya, dan harmonisasi kebijakan. Terjadi pemutusan arus komunikasi antara provinsi dan kabupaten, keterbatasan sumber daya (anggaran, personel, sarana), disposisi pelaksana yang terfragmentasi antara sikap formalistik di provinsi dan keterbatasan wewenang di kabupaten, serta struktur birokrasi yang terfragmentasi secara vertikal dan horizontal. Akibatnya, UKL-UPL tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif dan gagal berfungsi sebagai instrument pencegahan kerusakan lingkungan, yang tercermin dari terus berlanjutnya degradasi lahan, gangguan sistem hidrologi, dan luasan lahan tidak tereklamasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kewenangan operasional, penguatan kapasitas dan sumber daya, serta pengembangan sistem informasi terintegrasi berbasis digital untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal, sekaligus mengembalikan fungsi substantif UKL-UPL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, UKL-UPL, pertambangan pasir dan batuan, sentralisasi kewenangan, model Edward III, Kabupaten Klaten.